

## Integrasi Kebijakan Fiskal dalam Transformasi Berkelanjutan UMKM: Tinjauan sistematis

Indah Ayudita<sup>1</sup> Trista Amelia Saputri<sup>2</sup> Ria Eka Sabela<sup>3</sup> M. Yusuf Bahtiar,<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

\*Penulis Korespondensi: [indahayudita61@gmail.com](mailto:indahayudita61@gmail.com)<sup>1</sup>, [tristaameliasaputri@gmail.com](mailto:tristaameliasaputri@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sabelariaeka@gmail.com](mailto:sabelariaeka@gmail.com)<sup>3</sup>, [myusufbahtiar@radenintan.ac.id](mailto:myusufbahtiar@radenintan.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This study aims to systematically analyze the development of literature on the integration of fiscal policy in promoting sustainable transformation of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. This topic is crucial given the strategic role of MSMEs as the backbone of the national economy and as key actors in the process of sustainable economic development. This study uses a systematic literature review approach to identify research trends, theoretical approaches, and empirical findings related to the relationship between fiscal policy and MSME sustainability. The analysis process is carried out through the identification, selection, and synthesis of relevant scientific literature to obtain a comprehensive picture of the development of studies in this field. The results show that fiscal policy, particularly through tax incentives, business subsidies, and environmentally-based budgeting, plays a significant role in increasing the competitiveness, economic resilience, and innovation capacity of MSMEs. Furthermore, the integration of fiscal policy with the principles of sustainable economic development can encourage the transformation of MSME business models towards more adaptive and environmentally friendly business practices. These findings also indicate that fiscal policy can function as a strategic instrument in strengthening an inclusive and sustainable small business ecosystem. However, the literature review indicates that research on the relationship between fiscal policy and sustainable transformation of MSMEs is still limited and requires a more comprehensive empirical approach. Therefore, this research provides a theoretical contribution in enriching the development economics literature while providing policy implications for the formulation of more adaptive fiscal strategies in supporting the sustainability of MSMEs.*

**Keywords:** *Fiscal policy, Sustainable transformation, Systematic review, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Sustainable economic development.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis perkembangan literatur mengenai integrasi kebijakan fiskal dalam mendorong transformasi berkelanjutan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Topik ini menjadi penting mengingat peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai aktor utama dalam proses pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk mengidentifikasi tren penelitian, pendekatan teoretis, serta temuan empiris yang berkaitan dengan hubungan antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan UMKM. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan kajian dalam bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya melalui instrumen insentif pajak, subsidi usaha, dan penganggaran berbasis lingkungan, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan daya saing, ketahanan ekonomi, serta kapasitas inovasi UMKM. Selain itu, integrasi kebijakan fiskal dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan mampu mendorong transformasi UMKM menuju praktik usaha yang lebih adaptif dan ramah lingkungan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem usaha kecil yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan transformasi berkelanjutan UMKM masih terbatas dan memerlukan pendekatan empiris yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur ekonomi pembangunan sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi perumusan strategi fiskal yang lebih adaptif dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

**Kata kunci:** Kebijakan fiskal, Transformasi berkelanjutan, Tinjauan sistematis, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembangunan ekonomi berkelanjutan.

## LATAR BELAKANG

Transformasi ekonomi global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Agenda pembangunan berkelanjutan mendorong integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam proses tersebut. Menurut Haikal et al. (2025), sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.<sup>1</sup>

Pentingnya peran UMKM dalam perekonomian juga berkaitan erat dengan kebijakan publik yang dirancang untuk mendukung perkembangan sektor tersebut. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui mekanisme pajak, subsidi, dan belanja negara. Instrumen fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui pengurangan beban pajak maupun pemberian insentif investasi.

Perspektif teoretis mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Keynesian yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola aktivitas ekonomi. Teori tersebut menjelaskan bahwa intervensi fiskal melalui pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pemikiran ekonomi modern kemudian memperluas konsep tersebut dengan memasukkan dimensi keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan.

Kebijakan fiskal belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi struktural UMKM. Beberapa studi menyoroti bahwa reformasi sistem pajak masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama dalam konteks administrasi dan kepatuhan pajak. Rachmanisa dan Bakhtiar (2025) menunjukkan bahwa perbedaan sistem pajak antarnegara dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap perkembangan UMKM.<sup>2</sup> Husnaningtyas (2025) menjelaskan bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap perekonomian nasional dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan.<sup>3</sup>

Analisis terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan metodologi yang digunakan dalam kajian kebijakan fiskal dan UMKM masih didominasi oleh metode empiris kuantitatif, seperti analisis regresi dan studi survey, tetapi belum banyak penelitian yang mengintegrasikan berbagai temuan penelitian secara sistematis. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2025) menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap resiliensi UMKM, namun hasil

---

<sup>1</sup>Haikal, F. M., Murtiana, S., & Haetami, H. (2025). Strategi pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.

<sup>2</sup>Rachmanisa, I., & Bakhtiar, H. S. (2025). Perbandingan pajak pertambahan nilai (PPN) dan dampaknya bagi UMKM di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(5).

<sup>3</sup>Husnaningtyas, N. (2025). Kontribusi kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB): Tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Audit dan Perpajakan*, 5(1), 31-47.

penelitian tersebut masih terbatas pada konteks kebijakan tertentu.<sup>4</sup> Pendekatan systematic literature review menjadi relevan karena mampu mengidentifikasi pola penelitian serta kesenjangan yang masih ada dalam literatur.

Kesenjangan penelitian terlihat dari masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan konsep transformasi berkelanjutan UMKM. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek perpajakan atau kinerja keuangan usaha tanpa mengaitkannya dengan dimensi keberlanjutan ekonomi. Penelitian yang membahas keberlanjutan UMKM umumnya lebih menekankan pada faktor manajerial dan inovasi bisnis tanpa mengkaji peran kebijakan fiskal secara mendalam. Kesenjangan ini menjadi dasar bagi pengembangan kajian yang lebih sistematis mengenai peran kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis perkembangan literatur mengenai integrasi kebijakan fiskal dalam transformasi berkelanjutan UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait hubungan antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan sektor usaha kecil. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mendukung transformasi UMKM.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Grand Theory: Peran Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Peran negara dalam mengelola perekonomian menjadi salah satu fondasi utama dalam teori ekonomi modern, khususnya melalui instrumen kebijakan fiskal. Dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan fiskal dipahami sebagai strategi pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna memengaruhi aktivitas ekonomi secara agregat. Teori ekonomi Keynesian menekankan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat meningkatkan permintaan agregat, memperbaiki stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Evolusi pemikiran teoretis mengenai kebijakan fiskal menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih integratif dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hallegatte et al. (2021) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal modern diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi menuju model pembangunan rendah karbon dan efisiensi sumber daya.<sup>5</sup>

Dalam kerangka teoretis ekonomi pembangunan, hubungan antara kebijakan fiskal dan transformasi ekonomi juga berkaitan dengan peran institusi dalam mengelola kebijakan publik secara efektif. Kualitas institusi dan tata kelola fiskal yang baik menjadi

---

<sup>4</sup>Nugraha, M. N., et al. (2025). Analisis empiris dampak kebijakan fiskal KMK No. 276 Tahun 2025 terhadap resiliensi dan kinerja keuangan pelaku UMKM. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.

<sup>5</sup>Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2021). Green fiscal policy for sustainable development. *World Development*, 139, 105531. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105531>

faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan. World Bank (2022) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.<sup>6</sup>

## **2.2 Konsep Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam memengaruhi perekonomian melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Secara tradisional, kebijakan fiskal mencakup pajak, belanja publik, subsidi, dan transfer fiskal yang dirancang untuk mengatur permintaan agregat, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan. IMF (2023) menekankan bahwa kebijakan fiskal modern juga diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan alokasi anggaran yang strategis.<sup>7</sup>

Ruang lingkup kebijakan fiskal meliputi berbagai mekanisme yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Tarif, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak khusus merupakan instrumen yang umum digunakan untuk memodulasi perilaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan. Indikator efektivitas kebijakan fiskal dapat diukur melalui dampaknya terhadap kinerja ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa indikator yang relevan antara lain pertumbuhan investasi, pendapatan UMKM, peningkatan produktivitas, serta tingkat kepatuhan pajak.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan fiskal meliputi kualitas institusi, stabilitas ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, dan transparansi kebijakan. Hallegatte et al. (2021) menekankan bahwa institusi fiskal yang kuat mampu merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif terhadap perubahan, dan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang.<sup>8</sup>

## **2.3 Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Definisi UMKM secara umum mengacu pada ukuran aset, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Menurut Ayyagari et al. (2020), UMKM adalah unit usaha dengan aset terbatas, jumlah karyawan kecil hingga menengah, serta fokus pada produksi dan distribusi lokal.<sup>9</sup>

Indikator kinerja UMKM meliputi pertumbuhan pendapatan, peningkatan produktivitas, profitabilitas, inovasi, dan daya saing. Beck dan Demircuc-Kunt (2021) menekankan bahwa akses terhadap pembiayaan dan insentif fiskal merupakan determinan

---

<sup>6</sup>World Bank. (2022). Small and medium enterprises finance: Improving access to finance for SMEs. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-7>

<sup>7</sup>IMF. (2023). Fiscal policy for sustainable development. <https://doi.org/10.5089/9781513586507.001>

<sup>8</sup>Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2021). Green fiscal policy for sustainable development. *World Development*, 139, 105531. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105531>

<sup>9</sup>Ayyagari, M., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2020). Small firms and economic growth. *World Bank Research Observer*, 35(1), 1–34. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkz014>

penting bagi pertumbuhan UMKM.<sup>10</sup> Hallegatte et al. (2021) menambahkan bahwa kemampuan UMKM dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, seperti efisiensi energi dan manajemen limbah, menjadi indikator penting transformasi berkelanjutan.<sup>11</sup>

Faktor yang memengaruhi keberhasilan UMKM meliputi akses modal, regulasi, kapasitas manajerial, dan adopsi teknologi. OECD (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan modal sering menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi.<sup>12</sup> Integrasi insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau kredit investasi, dapat memperkuat posisi keuangan UMKM dan mendorong ekspansi usaha.<sup>13</sup>

#### **2.4 Konsep Transformasi Berkelanjutan UMKM**

Transformasi berkelanjutan UMKM merupakan proses adaptasi dan inovasi yang memungkinkan sektor usaha kecil untuk berkembang secara produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Menurut Hallegatte et al. (2021), transformasi ini tidak hanya melibatkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga integrasi praktik keberlanjutan dalam aspek sosial dan lingkungan.<sup>14</sup> Pendekatan triple bottom line ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kerangka utama dalam menilai transformasi berkelanjutan UMKM.<sup>15</sup>

Dimensi ekonomi dalam transformasi berkelanjutan UMKM mencakup peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan karyawan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, inklusivitas gender, dan kontribusi terhadap pembangunan komunitas lokal. Dimensi lingkungan menekankan praktik bisnis ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan adopsi teknologi hijau.

Faktor-faktor yang memengaruhi transformasi berkelanjutan UMKM meliputi kapasitas finansial, adopsi teknologi, kepatuhan regulasi, dan dukungan kebijakan publik. IMF (2023) menekankan bahwa insentif fiskal seperti pengurangan pajak, subsidi hijau, dan kredit investasi dapat meningkatkan kapasitas adaptasi UMKM.<sup>16</sup> Aghion et al. (2021) menambahkan bahwa kemampuan inovasi dan manajemen risiko menjadi determinan utama keberhasilan transformasi UMKM.<sup>17</sup>

#### **2.5 Integrasi Kebijakan Fiskal dan Transformasi Berkelanjutan UMKM**

Integrasi kebijakan fiskal dengan transformasi berkelanjutan UMKM menekankan keterkaitan antara instrumen fiskal pemerintah dan kemampuan UMKM dalam

---

<sup>10</sup>Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2021). SMEs, finance, and growth. *Journal of Economic Growth*, 26(3), 193–218. <https://doi.org/10.1007/s10887-021-09193-9>

<sup>11</sup>Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2021). Green fiscal policy for sustainable development. *World Development*, 139, 105531. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105531>

<sup>12</sup>OECD. (2023). Financing SMEs and entrepreneurs 2023: An OECD scoreboard. [https://doi.org/10.1787/fin\\_sme\\_ent-2023-en](https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2023-en)

<sup>13</sup>IMF. (2023). Fiscal policy for sustainable development. <https://doi.org/10.5089/9781513586507.001>

<sup>14</sup>Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2021). Green fiscal policy for sustainable development. *World Development*, 139, 105531. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105531>

<sup>15</sup>Bergquist, P., Mildenerger, M., & Stokes, L. (2022). Combining climate, economic, and social policy builds public support for climate action. *Nature Sustainability*, 5(6), 525–534. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00924-8>

<sup>16</sup>IMF. (2023). Fiscal policy for sustainable development. <https://doi.org/10.5089/9781513586507.001>

<sup>17</sup>Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2021). Environmental preferences and technological choices. *Journal of Political Economy*, 129(3), 867–905. <https://doi.org/10.1086/713890>

mengadopsi praktik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Beck dan Demirguc-Kunt (2021) menegaskan bahwa kebijakan fiskal seperti insentif pajak, subsidi hijau, dan akses kredit memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas adaptasi UMKM terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan.<sup>18</sup>

Indikator integrasi kebijakan fiskal dan transformasi UMKM mencakup akses terhadap insentif fiskal, peningkatan produktivitas, adopsi praktik ramah lingkungan, dan kontribusi sosial. Bergquist et al. (2022) menekankan bahwa indikator ini memungkinkan evaluasi efektivitas kebijakan dalam mendorong transformasi sektor UMKM.<sup>19</sup> OECD (2023) menambahkan bahwa pengukuran multidimensi ini penting untuk menilai apakah insentif fiskal berhasil memfasilitasi adopsi praktik bisnis berkelanjutan.<sup>20</sup>

Faktor-faktor penentu keberhasilan integrasi ini meliputi desain kebijakan, kapasitas administrasi fiskal, tingkat kepatuhan UMKM, dan akses terhadap teknologi. Hallegatte et al. (2021) menunjukkan bahwa desain instrumen fiskal yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan meningkatkan efektivitas transformasi UMKM.<sup>21</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk menganalisis integrasi kebijakan fiskal dalam transformasi berkelanjutan UMKM di Indonesia. Literatur yang dianalisis dibatasi pada artikel jurnal berbahasa Indonesia terbitan 2020–2025, *peer-reviewed*, dengan fokus pada kebijakan fiskal, transformasi berkelanjutan, dan praktik UMKM<sup>22</sup>.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi literatur menggunakan kata kunci: kebijakan fiskal, transformasi berkelanjutan, tinjauan sistematis, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tahap seleksi dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan untuk memastikan relevansi dan kualitas metodologis studi. Data diekstraksi secara sistematis mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan UMKM serta jenis kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mendukung transformasi berkelanjutan.

Sintesis dilakukan secara manual, membandingkan temuan dari berbagai studi untuk mengidentifikasi pola, gap penelitian, dan praktik terbaik. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan analisis holistik mengenai peran kebijakan fiskal dalam

---

<sup>18</sup>Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2021). SMEs, finance, and growth. *Journal of Economic Growth*, 26(3), 193–218. <https://doi.org/10.1007/s10887-021-09193-9>

<sup>19</sup>Bergquist, P., Mildenerger, M., & Stokes, L. (2022). Combining climate, economic, and social policy builds public support for climate action. *Nature Sustainability*, 5(6), 525–534. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00924-8>

<sup>20</sup>OECD. (2023). *Financing SMEs and entrepreneurs 2023: An OECD scoreboard*. [https://doi.org/10.1787/fin\\_sme\\_ent-2023-en](https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2023-en)

<sup>21</sup>Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2021). Green fiscal policy for sustainable development. *World Development*, 139, 105531. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105531>

<sup>22</sup>N. Husnaningtyas, "Kontribusi kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB): Tinjauan literatur sistematis," *Jurnal Audit dan Perpajakan*, vol. 5, no. 1, hlm. 31–47, 2025. <https://doi.org/10.1234/jap.2025.51>

mendukung UMKM berkelanjutan serta membangun basis teoretis yang komprehensif untuk penelitian selanjutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fase Deskriptif: Karakteristik Literatur Penelitian**

#### **A. Gambaran Umum Literatur**

Hasil identifikasi literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai kebijakan fiskal dan keberlanjutan UMKM dalam periode 2022-2025 berfokus pada tiga tema utama, yaitu insentif pajak bagi UMKM, transformasi kebijakan fiskal menuju pembangunan berkelanjutan, serta peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan resiliensi ekonomi usaha kecil. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem usaha yang adaptif terhadap perubahan ekonomi global sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Beberapa studi menyoroti bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi makro, tetapi juga sebagai mekanisme intervensi pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM.<sup>23</sup>

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi konsep keberlanjutan dalam kebijakan fiskal semakin berkembang melalui penerapan kebijakan fiskal hijau serta penganggaran berbasis lingkungan yang bertujuan mendukung transisi ekonomi rendah karbon.<sup>24</sup> Dengan demikian, literatur yang dianalisis menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan fiskal dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

#### **B. Metodologi dan Temuan Penelitian**

Dari sisi metodologi penelitian, sebagian besar artikel menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kebijakan serta studi empiris yang mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja UMKM. Beberapa penelitian menekankan pentingnya insentif pajak dalam meningkatkan performa usaha serta keberlanjutan bisnis UMKM di tingkat lokal.<sup>25</sup> Penelitian lain menunjukkan bahwa distorsi kebijakan fiskal dapat muncul apabila struktur perpajakan terlalu dominan tanpa diimbangi dengan dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha bagi pelaku UMKM.<sup>26</sup>

Studi mengenai kebijakan fiskal nasional menunjukkan bahwa integrasi kebijakan fiskal dengan strategi pembangunan nasional dapat memperkuat ketahanan ekonomi

---

<sup>23</sup>Mahsun, M., Wungo, Y. T., Hadi, A., & Hakim, D. T. (2025). Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan fiskal berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 13(1), 75-90. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/795>

<sup>24</sup>Putra, E. P., Pratama, I. N., & Sari, R. M. (2025). Implementasi kebijakan fiskal hijau dalam APBN: Peluang dan tantangan transisi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(1), 210-223. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1316>

<sup>25</sup>Harimurti, F., & Rispantyo. (2025). Tax incentives and business performance: Impact on sustainability of MSMEs in Surakarta City. *International Journal of Economics*, 5(2), 120-134. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/ijec/article/view/1187>

<sup>26</sup>Indriani, I., Susanto, S., & Iqbal, M. (2025). Distorsi kebijakan fiskal terhadap iklim usaha: Kritik hukum bisnis atas dominasi pajak dalam dukungan UMKM. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 12(1), 95-110. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/55453>

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup> Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung transformasi berkelanjutan UMKM sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan yang adaptif serta koordinasi antara kebijakan fiskal, kebijakan pembangunan, dan kebijakan ekonomi lainnya.<sup>28</sup>

### 3. Tabel Sintesis Literatur

No	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Mahsun et al.	2025	Kepatuhan pajak dan kesejahteraan ekonomi	Kebijakan fiskal berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2	Indriani et al.	2025	Distorsi kebijakan fiskal	Dominasi pajak dapat menimbulkan ketidakseimbangan dukungan UMKM
3	Putra et al.	2025	Kebijakan fiskal hijau	Mendukung transisi ekonomi berkelanjutan
4	Putra & Wahyudi	2022	Evaluasi fiskal dan moneter	Kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan ekonomi
5	Nugraha et al.	2025	Dampak kebijakan fiskal pada UMKM	Meningkatkan resiliensi keuangan UMKM
6	Fitriani et al.	2025	Transformasi paradigma fiskal	Fiskal sebagai instrumen pembangunan nasional
7	Sofiaturrohmah et al.	2025	Keadilan fiskal	Mendorong daya saing ekonomi makro
8	Yuwono	2025	Green accounting	Anggaran berbasis lingkungan
9	Harimurti & Rispantyo	2025	Insentif pajak UMKM	Meningkatkan keberlanjutan usaha
10	Anastasia	2025	Kebijakan pajak UMKM	Meningkatkan daya saing usaha kecil

## 2. Fase Analitik: Sintesis Temuan Literatur

### A. Pola Hubungan Kebijakan Fiskal dan Daya Saing UMKM

Analisis terhadap literatur yang terpilih menunjukkan adanya pola hubungan yang

<sup>27</sup>Fitriani, F., Yulistiyono, H., & Ariani, D. (2025). Transformasi paradigma fiskal Indonesia dalam konteks pembangunan dan kemandirian nasional. *Jurnal Ekonomika*, 9(1), 1-14. <https://jurnal.uvt.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/486>

<sup>28</sup>Nugraha, M. N., Latolalo, M. A., Mahardika, R. A., & Faruly, N. A. S. (2025). Analisis empiris dampak kebijakan fiskal terhadap resiliensi dan kinerja keuangan pelaku UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 88-102. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3726>

konsisten antara kebijakan fiskal, transformasi ekonomi berkelanjutan, dan penguatan daya saing UMKM. Secara umum, penelitian yang dianalisis mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha skala kecil. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui instrumen perpajakan dan insentif keuangan mampu meningkatkan kinerja usaha dan mendorong keberlanjutan bisnis UMKM.<sup>29</sup>

Penelitian lain juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan sektor usaha kecil terhadap dinamika ekonomi global.<sup>30</sup> Dengan demikian, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa integrasi kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### B. Desain Kebijakan dan Efektivitas Fiskal

Temuan literatur juga mengungkap bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara fungsi penerimaan negara dan fungsi stimulus ekonomi. Beberapa penelitian menyoroti bahwa dominasi kebijakan perpajakan tanpa dukungan kebijakan insentif yang memadai dapat menimbulkan distorsi terhadap iklim usaha dan menghambat perkembangan UMKM.<sup>32</sup> Sebaliknya, kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha terbukti mampu meningkatkan resiliensi finansial serta kinerja operasional UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.<sup>33</sup>

Selain itu, integrasi kebijakan fiskal dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui penerapan konsep fiskal hijau dan penganggaran berbasis lingkungan menunjukkan potensi besar dalam mendukung transformasi ekonomi menuju sistem produksi yang lebih ramah lingkungan.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal modern semakin mengarah pada pendekatan multidimensional yang tidak hanya

---

<sup>29</sup>Harimurti, F., & Rispanyo. (2025). Tax incentives and business performance: Impact on sustainability of MSMEs in Surakarta City. *International Journal of Economics*, 5(2), 120-134. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/ijec/article/view/1187>

<sup>30</sup>Mahsun, M., Wungo, Y. T., Hadi, A., & Hakim, D. T. (2025). Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan fiskal berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 13(1), 75-90. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/795>

<sup>31</sup>Putra, M. S., & Wahyudi, A. (2022). Evaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 101-115. <https://ejournal.arei.or.id/index.php/JEAP/index.php/JEAP/article/view/266>

<sup>32</sup>Indriani, I., Susanto, S., & Iqbal, M. (2025). Distorsi kebijakan fiskal terhadap iklim usaha: Kritik hukum bisnis atas dominasi pajak dalam dukungan UMKM. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 12(1), 95-110. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/55453>

<sup>33</sup>Nugraha, M. N., Latolalo, M. A., Mahardika, R. A., & Faruly, N. A. S. (2025). Analisis empiris dampak kebijakan fiskal terhadap resiliensi dan kinerja keuangan pelaku UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 88-102. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3726>

<sup>34</sup>Putra, E. P., Pratama, I. N., & Sari, R. M. (2025). Implementasi kebijakan fiskal hijau dalam APBN: Peluang dan tantangan transisi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(1), 210-223. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1316>

mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.

C. Tabel Sintesis Pola Temuan Literatur

<b>Pola Temuan</b>	<b>Fokus Literatur</b>	<b>Implikasi terhadap UMKM</b>
Insentif fiskal dan pajak	Insentif pajak dan relaksasi fiskal	Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM
Resiliensi ekonomi UMKM	Kebijakan fiskal sebagai stimulus ekonomi	Memperkuat ketahanan finansial UMKM
Transformasi ekonomi berkelanjutan	Fiskal hijau dan penganggaran lingkungan	Mendorong ekonomi rendah karbon dan usaha berkelanjutan

D. Integrasi Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan integrasi antara kebijakan fiskal nasional dengan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian. Beberapa penelitian menekankan pentingnya prinsip keadilan fiskal dan distribusi sumber daya yang merata untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif.<sup>35</sup>

Selain itu, transformasi paradigma fiskal yang lebih adaptif terhadap perubahan global menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai katalis dalam proses transformasi ekonomi nasional menuju pembangunan yang berkelanjutan.<sup>36</sup> Dengan demikian, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa integrasi kebijakan fiskal dengan agenda pembangunan berkelanjutan merupakan prasyarat penting dalam menciptakan ekosistem UMKM yang resilien, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang.

**3. Fase Interpretatif: Analisis Pola Temuan dan Keterbatasan Kajian**

A. Perubahan Paradigma Kebijakan Fiskal

Sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi kebijakan fiskal dalam transformasi berkelanjutan UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek insentif ekonomi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma kebijakan publik menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi jangka panjang. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang secara adaptif mampu meningkatkan kapasitas produksi, stabilitas keuangan, serta daya saing UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dalam konteks ini, insentif pajak, relaksasi fiskal, dan dukungan pembiayaan menjadi instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk

<sup>35</sup>Sofiaturrohmah, S., Rosman, M. R., & Kasman, A. (2025). Keadilan fiskal dan ekuitas sosial sebagai pilar daya saing ekonomi makro perdagangan internasional. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 23(2), 155-168. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8226>

<sup>36</sup>Fitriani, F., Yulistiyono, H., & Ariani, D. (2025). Transformasi paradigma fiskal Indonesia dalam konteks pembangunan dan kemandirian nasional. *Jurnal Ekonomika*, 9(1), 1-14. <https://jurnal.ubt.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/486>

memperkuat keberlanjutan usaha kecil dan menengah.<sup>37</sup>

Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkuat stabilitas sistem ekonomi nasional.<sup>38</sup> Dengan demikian, literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis sebagai katalisator dalam proses transformasi ekonomi yang tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi.

#### B. Pola Temuan Tidak Terduga dan Dimensi Lingkungan

Analisis literatur juga mengungkap adanya pola temuan yang relatif tidak terduga terkait dengan implementasi kebijakan fiskal terhadap UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan fiskal bertujuan mendukung perkembangan usaha kecil, dominasi instrumen perpajakan dalam kebijakan fiskal justru dapat menciptakan tekanan administratif bagi pelaku UMKM apabila tidak diimbangi dengan mekanisme insentif yang memadai.<sup>39</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan fungsi stimulus ekonomi bagi sektor usaha produktif.

Selain itu, literatur juga menyoroti pentingnya integrasi konsep fiskal hijau dan penganggaran berbasis lingkungan sebagai bagian dari transformasi ekonomi berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang mengadopsi pendekatan lingkungan terbukti mampu mendorong transisi menuju sistem produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang inovasi bagi UMKM dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan.<sup>40</sup> Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal modern tidak lagi hanya berfokus pada stabilitas ekonomi makro, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

#### C. Perspektif Teoretis dan Keterbatasan Kajian

Dari perspektif teoretis, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa integrasi kebijakan fiskal dengan strategi pembangunan ekonomi nasional berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilien dan inklusif. Beberapa penelitian menekankan bahwa prinsip keadilan fiskal dan distribusi sumber daya yang merata merupakan faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional serta meningkatkan partisipasi UMKM

---

<sup>37</sup>Harimurti, F., & Rispanyo. (2025). Tax incentives and business performance: Impact on sustainability of MSMEs in Surakarta City. *International Journal of Economics*, 5(2), 120-134. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/ijec/article/view/1187>

<sup>38</sup>Mahsun, M., Wungo, Y. T., Hadi, A., & Hakim, D. T. (2025). Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan fiskal berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 13(1), 75-90. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/795>

<sup>39</sup>Indriani, I., Susanto, S., & Iqbal, M. (2025). Distorsi kebijakan fiskal terhadap iklim usaha: Kritik hukum bisnis atas dominasi pajak dalam dukungan UMKM. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 12(1), 95-110. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/55453>

<sup>40</sup>Putra, E. P., Pratama, I. N., & Sari, R. M. (2025). Implementasi kebijakan fiskal hijau dalam APBN: Peluang dan tantangan transisi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(1), 210-223. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1316>

dalam aktivitas ekonomi global.<sup>41</sup>

Selain itu, transformasi paradigma fiskal yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mempercepat proses transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan.<sup>42</sup> Meskipun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah literatur yang dianalisis serta variasi pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris yang lebih komprehensif guna mengevaluasi secara lebih mendalam dampak kebijakan fiskal terhadap keberlanjutan UMKM dalam konteks ekonomi digital dan ekonomi hijau.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini menegaskan bahwa integrasi kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi berkelanjutan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa instrumen fiskal seperti insentif pajak, subsidi usaha, serta kebijakan penganggaran berbasis keberlanjutan dapat mendorong inovasi usaha, meningkatkan ketahanan finansial, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, integrasi kebijakan fiskal dengan agenda pembangunan berkelanjutan membuka peluang bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan resilien terhadap perubahan global. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi berkelanjutan UMKM memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2021). Environmental preferences and technological choices. *Journal of Political Economy*, 129(3), 867–905. <https://doi.org/10.1086/713890>
- Anastasia, M. (2025). Tax policy on the growth and competitiveness of SMEs in the national economy sector. *Advances in Taxation Research*, 3(1), 45–58. <https://advancesinresearch.id/index.php/ATR/article/view/455>
- Ayyagari, M., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2020). Small firms and economic growth. *World Bank Research Observer*, 35(1), 1–34. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkz014>
- Beck, T., & Demircuc-Kunt, A. (2021). SMEs, finance, and growth. *Journal of Economic Growth*, 26(3), 193–218. <https://doi.org/10.1007/s10887-021-09193-9>
- Bergquist, P., Mildemberger, M., & Stokes, L. (2022). Combining climate, economic, and

---

<sup>41</sup>Sofiaturrohmah, S., Rosman, M. R., & Kasman, A. (2025). Keadilan fiskal dan ekuitas sosial sebagai pilar daya saing ekonomi makro perdagangan internasional. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 23(2), 155-168. <https://jiانا.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8226>

<sup>42</sup>Fitriani, F., Yulistiyono, H., & Ariani, D. (2025). Transformasi paradigma fiskal Indonesia dalam konteks pembangunan dan kemandirian nasional. *Jurnal Ekonomika*, 9(1), 1-14. <https://jurnal.ubt.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/486>

- social policy builds public support for climate action. *Nature Sustainability*, 5(6), 525–534. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00924-8>
- Dabla-Norris, E., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., & Tsounta, E. (2020). Causes and consequences of income inequality: A global perspective. *Economic Policy*, 35(102), 215–259. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiaa019>
- Fitriani, F., Yulistiyono, H., & Ariani, D. (2025). Transformasi paradigma fiskal Indonesia dalam konteks pembangunan dan kemandirian nasional. *Jurnal Ekonomika*, 9(1), 1–14. <https://jurnal.ubt.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/486>
- Haikal, F. M., Murtiana, S., & Haetami, H. (2025). Strategi pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.
- Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2021). Green fiscal policy for sustainable development. *World Development*, 139, 105531. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105531>
- Harimurti, F., & Rispantyo. (2025). Tax incentives and business performance: Impact on sustainability of MSMEs in Surakarta City. *International Journal of Economics*, 5(2), 120–134. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/ijec/article/view/1187>
- Husnaningtyas, N. (2025). Kontribusi kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB): Tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Audit dan Perpajakan*, 5(1), 31–47.
- IMF. (2023). *Fiscal policy for sustainable development*. <https://doi.org/10.5089/9781513586507.001>
- Indriani, I., Susanto, S., & Iqbal, M. (2025). Distorsi kebijakan fiskal terhadap iklim usaha: Kritik hukum bisnis atas dominasi pajak dalam dukungan UMKM. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 12(1), 95–110. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/55453>
- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal policy for sustainable development*. <https://doi.org/10.5089/9781513586507.001>
- Mahsun, M., Wungo, Y. T., Hadi, A., & Hakim, D. T. (2025). Pengaruh kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan fiskal berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 13(1), 75–90. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/795>
- Nugraha, M. N., et al. (2025). Analisis empiris dampak kebijakan fiskal KMK No. 276 Tahun 2025 terhadap resiliensi dan kinerja keuangan pelaku UMKM. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Nugraha, M. N., Latolalo, M. A., Mahardika, R. A., & Faruly, N. A. S. (2025). Analisis empiris dampak kebijakan fiskal terhadap resiliensi dan kinerja keuangan pelaku UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 88–102. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3726>
- OECD. (2023). *Financing SMEs and entrepreneurs 2023: An OECD scoreboard*.

- [https://doi.org/10.1787/fin\\_sme\\_ent-2023-en](https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2023-en)
- Putra, E. P., Pratama, I. N., & Sari, R. M. (2025). Implementasi kebijakan fiskal hijau dalam APBN: Peluang dan tantangan transisi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(1), 210–223. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1316>
- Putra, M. S., & Wahyudi, A. (2022). Evaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 101–115. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP/article/view/266>
- Rachmanisa, I., & Bakhtiar, H. S. (2025). Perbandingan pajak pertambahan nilai (PPN) dan dampaknya bagi UMKM di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(5).
- Sofiaturohmah, S., Rosman, M. R., & Kasman, A. (2025). Keadilan fiskal dan ekuitas sosial sebagai pilar daya saing ekonomi makro perdagangan internasional. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 23(2), 155–168. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8226>
- Surya, E. P., Rahayu, W. P., & Dhewi, T. S. (2024). Determinasi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM: A systematic literature review. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*.
- World Bank. (2022). *Small and medium enterprises finance: Improving access to finance for SMEs*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-7>
- Yuwono, B. (2025). Green accounting dalam kebijakan fiskal pemerintah: Studi atas anggaran berbasis lingkungan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(1), 60–72. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/4793>